

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Abdulkadir, Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minnesota: West Group, 1999.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartono, Sri. *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*. Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 1999.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Bandung: KBM Indonesia, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

- Sudiarto. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Mataram: Mataram University Press, 2022.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Publika Global Media, 2024.
- Wijayanta, Tata. *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Wijayanta, Tata. *Cross-Border Insolvency: Kerja Sama Lintas Batas Antarlembaga Peradilan; Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Wijayanta, Tata. “Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Publik dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan: Peluang dan Tantangan.” Dalam *Pemikiran Guru Besar Universitas Gadjah Mada Menuju Indonesia Maju 2045: Bidang Sosial Humaniora*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Wijayanta, Tata, dan Sheva Trisanda Adistia. *Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.
- Wijayanta, Tata, B. E. Hermawan, Rado Fridsel Leonardus, dan Sheva Trisanda Adistia. *Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian: Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Pembagian Harta Pailit*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.

Jurnal

- Adistia, Sheva Trisanda, and Tata Wijayanta. ‘Eksistensi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Pengurus dan Pemberes Harta Pailit’. *Jurnal Privat Law* 10, no. 2 (2022): 341–353. <https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.77537>.
- Alwi. ‘Tinjauan Yuridis Upaya Pengajuan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi oleh Nasabah Asuransi’. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 4 (2021): 722–728. <https://doi.org/10.29210/020211225>.
- Chalandra, Cavan Nizar, Nurul Hidayah, dan Adisha Khansa Aulia. ‘Gelombang Krisis 1997–1998: Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Babak Baru Ekonomi Indonesia’. *Historia Pedagogia* 14, no. 2 (2025): 25–39. <https://doi.org/10.15294/hp.v14i02.37140>.

- Dewa, Mychael. 'Analisis Pengajuan Gugatan Pailit atau PKPU Tanpa Melalui OJK (Studi Kasus Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst)'. *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 203–214. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.87>
- Fatimah, Ferial, Siti Malikhatun Badriyah, dan Irawati Irawati. 'Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung dari Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit'. *Notarius* 14, no. 2 (2021): 818–821. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43752>.
- Fauzi, M. 'Tersesat Nomina Ventura'. *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 121–129. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.346>.
- Hapsari, Recca Ayu Hapsari, Tata Wijayanta, Irna Nurhayati, and Stanislav Vladimirov Mladenov. 'Bankruptcy Indicator Frameworks Used in Cross-Country Reviews (Indonesia–Russia Bankruptcy Law)'. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 24, no. 1 (2024): 63–76.
- Hasanah, Imrotul. 'Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi'. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 278–288. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1525>.
- Kartoningrat, Raden Besse. 'Kepastian Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Proses Kepailitan Perusahaan Efek'. *Perspektif* 22, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.613>.
- Lalamentik, S. A., H. Panjaitan, dan G. L. Tobing. 'Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi'. *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2023): 1270–1287.
- Leonardus, Rado Fridsel, Alexander Yovie Pratama Yudha, dan Tata Wijayanta. 'Practice of Applying Affidavits in Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligations'. *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (2023): 467–488.
- Maulidiana, L. 'Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia'. *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 102–120.
- Mamuaya, Ferari. 'Kedudukan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan di Indonesia'. *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–10.
- Pamungkas, Tri Royfa. 'Permohonan Pernyataan Pailit kepada Perusahaan Asuransi yang Telah Dicabut Izinnya'. *Lex Renaissance* 2, no. 6 (2021): 349–359.
- Paramita, Dyah, Lira Fadia Rahma, dan Endang Kartini Panggiarti. 'Analisis Kebijakan OJK dalam Mendorong Intermediasi dan Pemulihan Ekonomi'.

PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 6, no. 1 (2023): 66–73.
<https://doi.org/10.36815/prive.v6i1.2573>.

Samuel, Yoseph, Henes Kardinata, dan Reymond Hutauruk. ‘Fungsi dan Kewenangan OJK dalam Pengawasan Kesehatan Bank’. *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 363–371. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1433>.

Septiani, Vira Nadia, Iswi Hariyani, Bhim Prakoso, dan M. Afif Hasbullah. ‘Akibat Hukum Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga yang Diajukan oleh Pemohon yang Tidak Memiliki Legal Standing’. *Mimbar Yustitia* 7, no. 2 (2023): 208–223.

Sianipar, Yona Clarentia Dumora, Amanda, Elisatris Gultom, dan Sudaryat. ‘Kewenangan OJK Mengajukan Kepailitan terhadap BPR dan Implikasinya terhadap Perlindungan Kreditor Non-OJK’. *ADIL* 7, no. 1 (2025): 16–25.

Tektona, Rahmadi Indra, dan Choirur Roziqin. ‘Kepastian Hukum Kewenangan OJK terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan’. *Palar (Pakuan Law Review)* 6, no. 1 (2020): 123.

Wijayanta, Tata. ‘Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan-Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga’. *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014).

Wijayanta, Tata. ‘Batas Waktu Penyelesaian Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004’. *Yustitia: Jurnal Hukum* (2018).

Wijayanta, Tata. ‘Kajian tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Berdasarkan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan Malaysia’. *Legal Research Yearly Book, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada* (2010).

Wijayanta, Tata. ‘Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004’. *Mimbar Hukum* 26, no. 1 (2014): 2–12. <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>.

Wijayanta, Tata. ‘Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi’. *Mimbar Hukum* (2010).

Wijayanta, Tata. ‘Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru’. *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 330–346. <https://doi.org/10.22146/jmh.16230>.

Wijayanta, Tata, Sheva Trisanda Adistia, Rado F. Leonardus, and B. E. Hermawan. ‘Evaluation Study of the Chancery Court (Balai Harta Peninggalan) as a Bankruptcy Curator’. *Pandecta Research Law Journal* 18, no. 2 (2023): 300–324.

- Wijayanta, Tata, Sheva Trisanda Adistia, Rado F. Leonardus, dan B. E. Hermawan. 'Should Indonesia Learn from Malaysia and Singapore's Cross-Border Insolvency Asset Settlements?' *Yustisia* 13, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.79773>.
- Wijayanta, Tata, Sheva Trisanda Adistia, Wahyudi Kurniawan, Rado Fridsel Leonardus, dan Bambang Eryanto Hermawan. 'The Legal Ratio of Authority Transfer from the Capital Market Supervisory Agency to the Financial Services Authority as a Bankruptcy Petitioner'. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.36537>.
- Yusrizal. 'Analisis Yuridis Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek Ditinjau dari Asas Kemanfaatan (Studi Kasus Putusan Nomor 78/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)'. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 10 (2023): 689–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7991115>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst perihal Permohonan Pernyataan Pailit terhadap AIA, 26 Januari 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 perihal Permohonan Kasasi terhadap Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN Niaga.Jkt.Pst, 8 Juni 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 95 PK/FP/TUN/2021 perihal Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 20/P/FP/2020/PTUN-JKT, 5 Agustus 2021.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 20/P/FP/2020/PTUN-JKT perihal permohonan fiktif positif atas tindakan OJK dalam permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, 1 Desember 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 perihal Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, 26 November 2015.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst perihal Permohonan Pailit terhadap AAA, 29 Juni 2015.

Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pernyataan Pailit terhadap BV sebagai Perusahaan Modal Ventura.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 perihal Permohonan Kasasi terhadap Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., 7 Juli Agustus 2015.

Internet

Adrianus Octaviano. “Nasabah Ingin PKPU AJB Bumiputera, Ini Tanggapan OJK”. 6 Maret 2022, <https://keuangan.kontan.co.id/news/nasabah-ingin-pkpu-ajb-bumiputera-ini-tanggapan-ojk> (diakses 8 Januari 2026).

Ahmad Nasrullah. “Siaran Pers: Pencabutan Izin Usaha PT Brent Securities”. 13 Februari 2018, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SP-Izin-Brent.aspx> (diakses 3 Februari 2026).

CNBC Indonesia. “DAI Ungkap Cara Industri Asuransi Bangun Kepercayaan Masyarakat”. 26 Februari 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260226152337-4-714228/dai-ungkap-cara-industri-asuransi-bangun-kepercayaan-masyarakat> (diakses 8 Maret 2026).

HukumOnline. “Berkali-kali Perusahaan Ini Lolos dari Pailit”. 19 Februari 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/berkali-kali-perusahaan-ini-lolos-dari-pailit-lt54e6da78569cf/> (diakses 2 Februari 2026).

HukumOnline. “OJK: Putusan Pailit AAA Sekuritas Tak Sesuai UU”. 18 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk--putusan-pailit-aaa-sekuritas-tak-sesuai-uu-lt55fc0566266a1/?page=all> (diakses 13 Februari 2026).

Lembaga Penjamin Simpanan. “Program Penjaminan Polis: Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Industri Asuransi”, 6 Desember 2025. <https://lps.go.id/program-penjaminan-polis-meningkatkan-kepercayaan-publik-terhadap-industri-asuransi/> (diakses 8 Maret 2026).

Media Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Literasi & Inklusi Keuangan: Mengapa Sektor Nonbank Masih Tertinggal dari Perbankan”. 1 Oktober 2025, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/>

literasi-inklusi-keuangan-mengapa-sektor-nonbank-masih-tertinggal- dari-perbankan (diakses 8 Maret 2026).

Mochammad Januar Rizki. “Respons OJK Soal Putusan Sela PKPU Asuransi Kresna Life”.23 Desember 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/respons-ojk-soal-putusan-sela-pkpu-asuransi-kresna-life-lt5fe2f9889199b/> (diakses 8 Maret 2026).

Otoritas Jasa Keuangan. “Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan”. <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/struktur-organisasi.aspx> (diakses 5 Februari 2026).

Petrus Dabu. “Mengaku Tak Dimintai Pendapat Soal PKPU Kresna Life, Nasabah Kecewa dengan OJK”. <https://www.theeconomics.com/art-of-execution/mengaku-tak-dimintai-pendapat-soal-pkpu-kresna-life-nasabah-kecewa-dengan-ojk/> (diakses 8 Januari 2026).

Prisma Ardianto. “OJK Serius Menimbang Opsi PKPU Bumiputera”. 17 Juni 2021, <https://investor.id/finance/287763/ojk-serius-menimbang-opsi-pkpu-bumiputera> (diakses 8 Desember 2025).

Zefanya Aprilia. “Tok! Majelis Hakim Tolak Permohonan PKPU terhadap Wanaartha”. 3 Maret 2021 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230303074527-17-418513/tok-majelis-hakim-tolak-permohonan-pkpu-terhadap-wanaartha> (diakses 8 Desember 2025).

Wawancara :

Bryan Tambunan, 2026, Problematika Sikap Diam Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Pailit Terhadap Lembaga Jasa Keuangan, *Wawancara*, Jakarta, 23 Februari.

Sultan Nanta, 2025, Problematika Sikap Diam Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Pailit Terhadap Lembaga Jasa Keuangan, *Wawancara*, Yogyakarta, 18 Desember.